

MENYIAPKAN SULTAN PEREMPUAN: LEGITIMASI LANGIT DAN EFEKTIVITAS REZIM SULTAN HAMENGKUBUWONO X¹

Bayu Dardias

*Departemen Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Email: bayudardias@ugm.ac.id*

Diterima: 17-3-2016

Direvisi: 29-3-2016

Disetujui: 4-4-2016

ABSTRACT

Sultan Hamengkubuwono (HB) X of Yogyakarta has chosen his eldest daughter as his successor in a traditionally patrilineal Sultanate. This paper discusses the controversy surrounding Sultan HB X's decision by measuring the impact of his proclamations and orders for the Sultanate's long-term regime effectiveness. I argue that Sultan HB X's proclamations and orders based, which were based on mysticism and a sense of divinity, have been ineffectual for maintaining regime effectiveness inside and outside of the Sultanate. Within the Sultanate, the Sultan's siblings have argued that his decisions contradict the Sultanate's centuries-long tradition of rules (paugeran). Outside the palace walls, broader society has been divided over Sultan HB X's choice. One group supports Sultan HB X's decision, while the other group is determined to hold on firmly to their patriarchal cultural and historical traditions. While Sultan HB X's proclamations and orders have been ineffectual in maintaining the Sultanate and its influence, his decisions have even brought about an enormous challenge to the survival prospects of the Sultanate itself.

Keywords: *political legitimation, regime, Sultan Hamengkubuwono, Yogyakarta Sultanate*

ABSTRAK

Pada 2015, Sultan Hamengkubuwono (HB) X mengeluarkan empat kali Sabda dan Dawuh Raja yang berkaitan dengan suksesi kepemimpinan di Kasultanan Yogyakarta. Tanpa memiliki putra laki-laki, Sultan HB X menunjuk putri sulungnya sebagai penerus takhta yang menganut patrilineal. Berdasarkan pada teori tentang efektivitas rezim, tulisan ini bertujuan menguji efektivitas rezim aristokrasi Sultan HB X, terutama dilihat dari implikasi politik Sabda Raja dan Dawuh Raja. Penulis berargumen bahwa penggunaan petunjuk langit sebagai basis legitimasi politik tidak cukup efektif menciptakan dukungan politik bagi rezim Sultan HB X. Kondisi ini menjadi ciri melemahnya rezim aristokrasi, tidak hanya di luar lingkungan Kasultanan, tetapi juga ke dalam. Legitimasi mistisisme yang berdasarkan pada petunjuk langit tidak mampu menjadi basis legitimasi di tengah masyarakat yang berubah semakin rasional. Di lingkup internal, Sabda dan Dawuh Sultan HB X menghilangkan kemampuan Kasultanan untuk memilih pemimpin politik masa depan dan bertentangan dengan ketentuan (paugeran) yang selama ini berlangsung. Di luar tembok istana, masyarakat terbelah antara mendukung Sultan dan tantangan budaya, adat, serta sejarah. Di tengah menguatnya posisi politik Kasultanan dalam demokrasi Indonesia, kondisi ini merupakan tantangan terbesar.

Kata kunci: legitimasi politik, rezim, Sultan Hamengkubuwono, Kasultanan Yogyakarta

¹ Sebagian kecil dari materi ini pernah dipresentasikan bersama John Monfries dalam forum diskusi Indonesian Study Group di Australian National University, Canberra, pada 26 Agustus 2015, dengan judul *The Yogyakarta Crisis of 2015*.

PENDAHULUAN

Tulisan ini menjawab pertanyaan bagaimana efektivitas rezim aristokrasi Sultan Hamengkubuwono X (HB X) dipengaruhi oleh isu suksesi serta implikasi politik dari Sabda Raja dan Dawuh Raja. Saya berpendapat bahwa, diukur dari efektivitas rezim seperti definisi Munck (1996) dan Beetham (1991), rezim Sultan HB X mulai melemah di kalangan internal Kasultanan Yogyakarta karena kegagalan menggunakan legitimasi mistisisme dalam menentukan penerus takhta. Indikasi melemahnya kontrol rezim dilihat dari penolakan terhadap keputusan Sultan HB X memilih putri sulungnya, GKR Pembayun (yang selanjutnya berganti nama menjadi GKR Mangkubumi—nama Mangkubumi menjadi salah satu nama untuk menunjuk penerus takhta), sebagai putri mahkota. Rezim aristokrasi HB X juga semakin tidak efektif karena aturan main yang digunakannya tidak menjadi prinsip bersama yang disepakati dan diikuti di lingkup internal kekuasaan. Selain itu, Sultan HB X menciptakan perpecahan eksternal rezim karena basis legitimasi mistisisme yang digunakan sebagai dasar Sabda dan Dawuh tidak mendapatkan tempat di kondisi masyarakat yang semakin rasional. Seluruh analisis tersebut akan dipadukan dengan kondisi politik yang berubah setelah diundangkannya Undang-Undang Keistimewaan (UUK) Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2012.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menemukan momentum politik baru dalam demokrasi Indonesia setelah diundangkannya UUK. Setelah melalui proses panjang sejak reformasi, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki kewenangan istimewa di tingkat provinsi yang meliputi lima bidang: kebudayaan, pertanahan, tata ruang, kelembagaan, serta posisi gubernur dan wakil gubernur yang otomatis dijabat Sultan dan Paku Alam yang bertakhta. Posisi kedua institusi tradisional di DIY, yaitu Kasultanan Yogyakarta (Kasultanan) dan Kadipaten Pakualaman (Paku-alaman), mendapatkan perlakuan khusus dalam sistem politik Indonesia. Pemimpin politik di DIY ditentukan bukan oleh pemilu kepala daerah seperti terjadi di 33 provinsi lainnya, melainkan oleh pergantian kepemimpinan tradisional di dua institusi tersebut. Selain itu, Kasultanan

dan Pakualaman memiliki kontrol terhadap tanah yang menjadi sumber daya politik jangka panjang. Melalui kewenangan istimewa tersebut, aristokrasi di Yogyakarta tetap akan kuat secara politik walaupun mengalami beberapa pelemahan di lingkungan internal rezim.

Beberapa literatur membahas tentang menguatnya aristokrasi dan integrasinya dalam politik Indonesia pascareformasi sebagai bagian dari menguatnya identitas lokal dan semangat komunal serta nostalgia masa lalu (Cribb, 2006; Dwipayana, 2004; Klinken, 2007). Sentimen tradisionalisme dan sejarah mampu dijadikan magnet guna menarik dukungan politik untuk berkompetisi dalam pemilu di tingkat lokal, misalnya di Bantul (Sulistiyanto, 2009), Gianyar (MacRae & Putra, 2007), Gowa (Buehler & Tan, 2007) dan Maluku Utara (Smith, 2009). Keberhasilan integrasi Yogyakarta dalam institusi demokrasi melalui UUK Yogyakarta diinginkan oleh daerah lainnya, tetapi sulit disamai. Integrasi tersebut mengandalkan sejarah dan praktik masa lalu sebagai basis legitimasi (Dardias, 2009). Oleh karena itu, ketika wacana pemilihan langsung gubernur dilakukan, masyarakat menolak karena tidak sesuai dengan tradisi (Harsono, 2011). Namun, literatur tentang politik aristokrasi masih menyisakan banyak celah, terutama dikaitkan dengan perkembangan politik kekinian, baik perkembangan di lingkup internal kerajaan maupun dampaknya terhadap masyarakat. Tulisan ini ingin mengisi gap tersebut.

Kasultanan dan Pakualaman termasuk ke dalam empat kerajaan yang merupakan pemekaran dari Mataram Islam selain Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran, yang menggunakan garis patriarki untuk menentukan pemimpin. Kuatnya simbol patriarki tersebut tecermin, antara lain, dari senjata, regalia, serta tata cara adat dan struktur keraton. Dalam tradisi pemerintahan yang selama ini berlangsung, perempuan ditempatkan dalam satu departemen *keputren*, sementara departemen-departemen lainnya dijabat oleh laki-laki. Dalam perjalanan sejarah Mataram, calon raja berikutnya dapat dengan mudah ditentukan karena raja yang bertakhta biasanya memiliki lebih dari satu istri dengan banyak putra. Jika salah satu istrinya diangkat menjadi permaisuri, dialah yang memiliki

kedudukan lebih utama untuk menurunkan raja selanjutnya dibandingkan dari selir, walaupun anak lelaki selir tersebut merupakan anak tertua raja.

Tradisi patriarki mendapat tantangan karena dua hal: berakhirnya tradisi poligami dan keengganan raja yang bertakhta untuk menentukan permaisuri dari istri-istrinya. Ketika tradisi poligami diputus, raja memiliki kemungkinan lebih kecil untuk mendapatkan anak laki-laki karena sumber keturunannya hanya berasal dari satu rahim. Selain itu, beberapa raja yang memiliki lebih dari satu istri tidak menentukan permaisuri dari istri-istrinya, yang menyebabkan aristokrasi kesulitan menentukan kandidat raja karena keturunan laki-laki berebut takhta.

Kedua masalah tersebut ada di Kasultanan, yang kesulitan memilih penerus Sultan HB X karena tidak memiliki putra laki-laki—tetapi lima orang putri—dan sudah menunjuk permaisuri. Sultan HB X menolak berpoligami didasari oleh pengalaman pribadi memiliki saudara tiri (“Blak-blakan dengan”, 2007). Selain itu, Sultan menobatkan satu-satunya istrinya, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Hemas, menjadi permaisuri (Syamsi, 2012). Sebagai solusi, Sultan HB X mengeluarkan Sabda dan Dawuh, yang menunjuk GKR Mangkubumi menjadi calon penerus takhta.

Naskah ini dihasilkan dari penelitian lapangan di Yogyakarta dan Jakarta selama akhir 2014 sampai awal 2016 dengan mewawancarai lebih dari 60 informan, baik di Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Pakualaman, kalangan akademisi dan tokoh masyarakat, serta unsur politik dan pemerintah. Diskusi akan diawali dengan pembahasan tentang rezim aristokrasi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang sistem Kasultanan yang berbasis agraris yang berimplikasi pada proses menentukan pemimpin politik, dengan melihat keseluruhan kandidat yang dapat menjadi raja. Bagian berikutnya membahas tentang detail Sabda dan Dawuh yang terkait dengan suksesi, serta membandingkan dan menganalisisnya dengan perspektif komparatif. Selanjutnya, akan dibahas tentang dampak dari sabda-sabda tersebut, terutama berkaitan dengan legitimasi politik berbasis mistisisme. Simpulan tulisan ini akan menakar implikasi praktis dari melemahnya rezim Sultan HB X.

EFEKTIVITAS REZIM ARISTOKRASI

Literatur tentang rezim, menempatkan rezim tradisional sebagai salah satu tipe rezim yang bertahan hingga saat ini. Rezim tradisional berpedoman pada dua hal, yaitu garis darah dan sejarah sebagai basis legitimasi. Studi komparatif Kailitz (2013) membagi rezim politik menjadi tujuh kategori, yaitu *liberal*, *electoral*, *communist*, *one-party*, *monarchy*, *military regime*, dan *personalist*. Salah satu ciri penting dari monarki adalah justifikasi rezim monarki berpedoman kepada “*she/he has a God-given, natural or at least established historical right to rule because of his or her descent, regardless of the political outcome of his or her rule*” (hlm. 48). Dengan demikian, dalam definisi ini, baik-buruknya cara memerintah tidak menjadi persoalan serius karena pemimpin berikutnya ditentukan bukan oleh kepiawaiannya memimpin, melainkan hubungan darah.

Rezim monarki mengutamakan hubungan darah dan kesejarahan memerintah. Dalam analisis Beetham (2013, xv), tipe rezim tradisional merupakan salah satu dari enam rezim lainnya (*fascist*, *communist*, *liberal-democratic*, *theocratic*, *technocratic*, dan *dictatorial*), yang dibagi berdasarkan pada jenis hukum, sumber otoritas, tujuan pemerintah, dan model kesepakatan publik. Beetham (2013) menyebut rezim yang sumber otoritasnya didasarkan pada keturunan (*heredity*) dan sejarah (*the past*) sebagai tipe rezim tradisional. Rezim tradisional menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber hukum dan bertujuan memberikan kesejahteraan dalam batas-batas tradisional. Kesepakatan publik dalam rezim tradisional diperoleh dari kesepakatan elite sosial.

Monarki, seperti yang didiskusikan di atas, tidak ditemukan dalam konteks Indonesia pascareformasi, terutama karena level institusionalisasi dan level fragmentasi. Level institusionalisasi kerajaan-kerajaan di Indonesia sangat rendah, kecuali Kasultanan Yogyakarta (Kasultanan). Mereka tidak mampu menciptakan institusi yang kompleks dan bekerja efektif seperti layaknya sebuah rezim. Selain itu, mereka terfragmentasi dan berada maksimum pada level provinsi, menjadikan kerajaan-kerajaan di Indonesia tidak mampu disandingkan dengan monarki di

Brunei, Thailand, Kamboja, Laos, dan Malaysia. Aristokrasi di Indonesia mayoritas berpengaruh secara politik di kabupaten/kota, kecamatan, atau bahkan desa seperti di Maluku (Brauchler, 2011). Gabungan Kasultanan dan Kabupaten Pakualaman (Pakualaman) adalah satu-satunya pengecualian yang dampak politiknya berada di level provinsi. Oleh karena itu, kerajaan di Indonesia lebih tepat didefinisikan sebagai aristokrasi yang memiliki prinsip yang sama dengan monarki dalam konteks yang lebih kecil. Lieven (1994) mendeskripsikan aristokrasi sebagai “*a historical, hereditary ruling class*,” sehingga definisi rezim seperti dalam monarki dapat dipinjam untuk menjelaskan aristokrasi di Indonesia.

Lemahnya daya institusionalisasi dan terfragmentasinya aristokrasi di Indonesia dapat dijelaskan melalui geografis dan sejarah, terutama terkait dengan perlakuan pemerintahan kolonial. Kershaw (2001a), misalnya, dalam studinya tentang monarki di Asia Tenggara, menempatkan Indonesia sebagai sebuah pengecualian. Secara geografis, lima negara di Asia Tenggara yang menganut monarki terdiri atas struktur geografis daratan yang mampu digunakan sebagai basis konsolidasi ekonomi agraris. Salah satu aristokrasi perairan Kasultanan Sulu di Selatan Filipina gagal mempertahankan diri pada abad ke-20. Kedua, pemerintah Belanda memperlakukan hubungan dan kontrak politik yang berbeda pada tiap-tiap kerajaan dalam konteks “*indirect rule*” yang membuatnya tidak hanya gagal terintegrasi, tetapi justru terpecah dan saling bermusuhan di antara mereka sendiri. Setelah Perang Diponegoro pada 1830, terutama di Jawa, Belanda mengubah sistem koloni menjadi “*most direct*”, yang menjadikan aristokrasi paling tidak efektif memerintah dibandingkan monarki di Asia Tenggara lainnya (Kershaw, 2001b, 4). Dari 282 wilayah yang dapat mengelola daerahnya sendiri secara terbatas, diberlakukan kontrak panjang untuk 14 kerajaan melalui *staatblaad* pada 1939–1941 dan 268 sisanya dengan kontrak pendek melalui *staatblaad* 1919/822 (Cribb & Brown, 1995; Kasepuhan Cirebon, 2014).

Daya tahan dan kemampuan rezim untuk bertahan dari gelombang politik ditentukan oleh seberapa efektif rezim mampu mengontrol

anggotanya. Munck (1996, 6) mendefinisikan efektivitas rezim politik berdasarkan pada dipatuhinya aturan main yang diukur melalui tiga hal: jumlah dan jenis aktor politik yang dapat menduduki kekuasaan, metode yang digunakan untuk mencapai posisi tersebut, serta aturan yang mengikat dan ditaati oleh anggota rezim. Dengan demikian, pemimpin rezim harus mampu mengontrol dan memastikan seleksi dalam anggota rezimnya. Seleksi aktor politik ini dikendalikan oleh mekanisme yang berlangsung di dalam rezim. Senada dengan Munck, Beetham (1991, 16) melihat bahwa kekuasaan dapat dikatakan *legitimate* (sah) apabila memenuhi tiga hal: “*it conforms of established rules, the rules can be justified by reference to beliefs shared by both dominant and subordinate, and there is evident of consent by the subordinate to the particular power relation.*” Jadi, kekuasaan yang *legitimate* mensyaratkan adanya aturan main. Aturan main menjadi kepercayaan bersama yang ditaati dan adanya tindakan yang mendukung aturan main tersebut. Sebaliknya, Beetham (1991) juga menandai kekuasaan yang tidak *legitimate* ditandai dengan tidak disepakatinya aturan main, adanya gap antara aturan main sebagai kepercayaan bersama dan adanya delegitimasi.

SISTEM POLITIK DALAM ARISTOKRASI AGRARIS

Tipologi aristokrasi di Indonesia, mengikuti karakter di Asia Tenggara, bisa dikerucutkan menjadi dua tipe utama, yakni agraris dan perairan. Tipologi yang pada awalnya didasarkan pada basis ekonomi ini mengejawantah menjadi sistem sosial, politik, dan budaya yang berbeda satu sama lain sehingga menciptakan karakter-karakter yang khas (Bastin & Benda, 1968; Legge, 1980; Wolters, 1999). Tipe agraris mengandalkan, terutama, tanah, sementara perairan mengandalkan pelayaran dan perdagangan. Penduduk kerajaan agraris relatif lebih homogen dibandingkan perairan.

Air dan dibangunnya sistem pengairan menjadi sumber kekuatan penting bagi stabilitas politik dan sosial di kerajaan agraris. Wittfogel (1967), misalnya, membagi masyarakat agraris di Asia menjadi dua berdasarkan pada kemampuannya

menciptakan sistem irigasi yang berguna untuk stabilitas pangan dan akhirnya berimplikasi pada sistem politik yang digunakan. Wittfogel membaginya menjadi *hydraulic society* dan *hydraulic civilization*. Pada *hydraulic society*, masyarakat secara mandiri dalam skala kecil membuat organisasi untuk menata sumber air bagi pertanian. Pada masyarakat *hydraulic civilization*, penataan air tidak lagi hanya digunakan sebatas untuk pertanian, tetapi dikembangkan dalam skala yang lebih luas dan mampu digunakan untuk mencegah bencana seperti banjir. Wittfogel juga menggarisbawahi bahwa despotisme penguasa di Asia ditentukan oleh seberapa efektif kontrol kerajaan terhadap sistem pengairan. Semakin menuju *civilization*, peluang untuk menjadi despot semakin besar karena memiliki kontrol terhadap sumber daya ekonomi paling penting, yaitu air.

Pada aristokrasi yang berkarakter agraris, sumber ekonomi, sosial, dan politik didasarkan pada penyatuan tiga unsur, yaitu tanah, air, dan tenaga kerja. Tanah menjadi sumber ekonomi penting bagi kerajaan agraris yang berhubungan erat dengan konstelasi politik. Proses perpecahan di Mataram, misalnya, terjadi salah satunya karena wilayah Pakubuwono II di pesisir Utara menyusut akibat perjanjian Ponorogo lantaran gagal menghentikan pemberontakan China. Sebagai bentuk protes atas hilangnya tanah sebagai sumber ekonomi di wilayah pesisir, Raden Mas Said melakukan pemberontakan. Pakubuwono II akhirnya membuat sayembara untuk menghentikan pemberontakan dengan janji hadiah kekuasaan di daerah Sukowati, yang selanjutnya memicu pemberontakan Pangeran Mangkubumi karena Pakubuwono II ingkar janji setelah Pangeran Mangkubumi berhasil menekan RM Said. VOC mengakhiri konflik di Jawa dengan membagi Mataram menjadi tiga kerajaan melalui perjanjian-perjanjian (Ricklefs, 1981; Selosomardjan, 1962; Woodward, 1989).

Di sejarah Mataram, air selalu menjadi perhatian penting dan letak posisi kerajaan selalu mempertimbangkan sungai. Kerajaan di Jawa selalu mengandalkan aristokrasi yang berbasis pada agraris (Legge, 1980). Ketika Malaka dikuasai Portugis pada awal abad ke-16, praktis kerajaan di Jawa hanya mengandalkan sumber ekonomi dari

pedalaman. Kasunanan Surakarta, misalnya, memanfaatkan aliran Sungai Bengawan Solo untuk keperluan pertanian. Di Yogyakarta, pemilihan kerajaan di alas Beringan, yang terletak di *geger bulus* (punggung kura-kura), mempertimbangkan Sungai Progo di barat dan Sungai Opak di timur yang penting untuk pertanian sekaligus aman dari ancaman banjir.

Tenaga kerja menjadi penyatu tanah dan air karena, tanpa tenaga kerja, kedua faktor produksi tersebut tidak berguna. Pentingnya tenaga kerja dalam membangun kerajaan ditunjukkan dalam Perjanjian Giyanti, yakni ketika VOC tidak hanya memberi Pangeran Mangkubumi tanah, yang kemudian menjadi Yogyakarta, tetapi juga *cacah* (jiwa yang dihitung per keluarga) sebagai penggarap. Dalam setiap pemekaran Mataram selanjutnya, tenaga kerja selalu menjadi perhitungan penting dalam perjanjian. Pada saat Raffles memberikan hadiah tanah kepada Pangeran Notokusumo (Paku Alam I), jumlah keluarga menjadi salah satu poin penting.

Sebagai cara untuk memperluas tanah, memperbaiki sistem pengairan, dan sekaligus menjamin tenaga kerja, penguasa kerajaan agraris dihadapkan pada upaya untuk menjamin legitimasi. Masyarakat agraris sangat menggantungkan diri pada alam, cuaca, dan musim sehingga cenderung religius. Walaupun sudah mencatat perubahan cuaca yang dapat mempengaruhi hasil panen mereka, seperti ditunjukkan dalam sistem *panata mangsa* (kalender masa tanam dalam hitungan kalender Jawa (Ricklefs, 1999), mereka dihadapkan pada kondisi tidak pasti menghadapi perubahan cuaca dan hama tanaman. Keterbatasan menjelaskan fenomena alam dan ketidakpastian hasil panen membuat para petani menggantungkan diri pada sesuatu yang irasional, dan hal ini dimanfaatkan oleh penguasa politik sebagai basis legitimasi dengan menciptakan mitos dan mistis. Keseluruhan bangunan mitos-mistis tersebut berpusat pada figur penguasa yang dianggap sebagai penghubung dua alam, nyata dan gaib, meniru konsep dewa-raja dalam Hindu.

Legitimasi penguasa Mataram, misalnya, dibangun dari mitos yang berasal dari petani Ki Ageng Giring, yang secara tidak sengaja meminum air kelapa milik Ki Ageng Pemanahan

(Soemanto, 2003). Maka keturunan peminum air kelapa tersebut akan menjadi raja-raja Mataram. Selain itu, diciptakan pula mitos tentang penguasa laut selatan, Ratu Kidul yang membantu raja pertama Mataram, Panembahan Senopati, membangun kerajaan baru di Pleret, Yogyakarta. Senopati diceritakan menghabiskan tiga hari tiga malam di kerajaan Ratu Kidul di dalam lautan. Sejak saat itu, seluruh empat penerus Kerajaan Mataram adalah suami Ratu Kidul dan dipercaya memiliki kontak langsung dengannya (Selosoemardjan, 1962, 18). Seluruh legitimasi yang didasari oleh mitos ini dipakai sebagai upaya untuk membangun legitimasi politik dalam konteks masyarakat tradisional-irasional.

Di Kasultanan Yogyakarta, legitimasi irasional didasarkan pada keberadaan Ratu Kidul dan Kiai Sapu Jagad di Gunung Merapi. Kesatuan selatan-utara ini membentuk garis lurus geografis imajiner Yogyakarta, yang terdiri atas Parangkusumo, yang dipercaya sebagai tempat pertemuan Ratu Kidul dan Panembahan Senopati; Panggung Krapak; Siti Hinggil; Tugu; serta Gunung Merapi. Ketika Sultan Yogyakarta berdiri di Siti Hinggil menghadap ke utara, dia akan melihat Tugu dan Gunung Merapi dalam satu arah pandangan. Ketaatan sekaligus ketakutan terhadap mitos ini dapat dilihat dari tidak dimanfaatkannya potensi laut selatan Yogyakarta dari sisi ekonomi. Sampai sekarang, Yogyakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang memiliki garis pantai 113.000 km, tetapi tidak memiliki pelabuhan yang dapat dilayari kapal berukuran sedang dan besar (Bappeda DIY, 2014). Selama berabad-abad, tidak ada nelayan di pesisir selatan Yogyakarta. Kultur perairan dimulai pada 1983 setelah ada beberapa nelayan dari Cilacap yang memperkenalkan kultur laut dan mengubah petani menjadi nelayan (“Wamin, Mbahnya”, 2009).

Dalam tradisi aristokrasi agraris di Mataram, pemimpin politik ditentukan oleh kontestasi internal di antara anggota keluarga inti kerajaan, yang dalam sejarah selalu dipegang oleh laki-laki. Pada beberapa kasus, penerus takhta berlanjut bukan ke anak lelaki, melainkan menyamping ke saudara lelaki raja (anak lelaki raja sebelumnya). Harjono (2012) mencatat, pada 1855, Sultan HB VI diangkat dari adik Sultan HB V

karena ketiadaan putra laki-laki. Yurisprudensi ini digunakan oleh saudara laki-laki Sultan HB IX bahwa merekalah yang lebih berhak meneruskan takhta Kasultanan.

Sistem patriarkal ini erat kaitannya dengan sistem irigasi dan penggarapan tanah. Raja menerima upeti dan sumber ekonomi dari tanah yang pengurusannya diserahkan kepada para pangeran dan bupati sebagai penguasa wilayah. Para pangeran dan bupati mengandalkan para *bekel* sebagai perantara dengan tenaga kerja sekaligus mengandalkan mereka untuk mengorganisasi petani. Peran *bekel* ini sangat krusial sebagai perantara antara pemilik dan penggarap yang digaji dengan sistem bagi hasil. Para *bekel* kemudian bertransformasi menjadi kepala desa. Seluruh sistem *apanage* di atas menggunakan basis patriarki, yaitu penggantian raja, pangeran, bupati, hingga *bekel* dijabat secara turun-temurun mengikuti garis laki-laki (Suhartono, 1991).

Sebagai basis legitimasi paling penting untuk sistem politik dan ekonomi, seluruh silsilah keturunan mulai Sultan Hamengkubuwono I dicatat dengan rapi di dalam sebuah divisi di Kasultanan yang disebut *Darah Dalem*. Penerus saat ini diperebutkan antara putra Sultan HB IX dan putri Sultan HB X. Menurut KRT Mandoyokusumo (1980), Sultan Hamengkubuwono IX memiliki 15 putra dan tujuh putri dari keempat istrinya, dan tidak ada satu pun dari kelima istrinya yang diangkat menjadi permaisuri. Penentuan Sultan HB X ditentukan melalui rapat keluarga yang dilakukan setelah Sultan HB IX mangkat dan dilihat dari penanda pemberian nama KGPH Mangkubumi kepada Herjuno Darpito, yang saat ini menjadi Sultan HB X (Roem, Lubis, Mochtar, & Maimoen, 2011; “Robohnya Kraton Kami”, 1985). Setelah mendapat nama Mangkubumi, sesaat sebelum dinobatkan sebagai sultan, KGPH Mangkubumi dilantik terlebih dahulu menjadi putra mahkota selama lima menit dengan gelar *Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Hamengku Negoro Sudibyo Raja Putra Nalendra Mataram*. Tiga orang putra HB IX sudah meninggal, yaitu GBPH Hadikusumo, GBPH Joyokusumo, dan BRM Kuslardiyanto, sehingga saat ini Sultan HB X memiliki 11 adik laki-laki. Berikut ini ke-11 adik Sultan HB X berdasarkan usia dan kepangkatan mereka di dalam internal keraton.

Tabel 1. Adik Laki-laki Sultan Hamengkubuwono X Berdasarkan Garis Ibu

Ibu Windyaningrum	Ibu Pintokopurnomo	Ibu Hastungkoro	Ibu Ciptomurti
KGPH Hadiwinoto (1)	GBPH Hadisuryo (2)	GBPH Prabukusumo (3)	GBPH Pakuningrat (4)
		GBPH Yudhaningrat (5)	GBPH Cakraningrat
		GBPH Chandraningrat	GBPH Suryodiningrat
			GBPH Suryometaram
			GBPH Hadinegoro
			GBPH Suryonegoro

* *KGPH: Kanjeng Gusti Pangeran Haryo, gelar dua tingkat di bawah Sultan dan Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA) sebagai Putra Mahkota.*

** GBPH: Gusti Bendara Pangeran Haryo, satu tingkat di bawah KGPH.

*** Angka (1) sampai (5) menunjukkan urutan berdasarkan pada usia walaupun urutan kelahiran tidak selalu dijadikan prinsip utama penerus takhta.

Sumber: Hasil wawancara penulis dengan kerabat dan abdi dalem Kasultanan Yogyakarta (Kurniadi, 2015b).

Dalam sistem patriarkal yang berlangsung selama ini, sekaligus mengikuti yurisprudensi yang terjadi semasa pergantian pemimpin dari Sultan HB V ke VI, salah satu dari adiknya yang berhak menjadi Sultan HB XI. Lebih lanjut, dari 11 adik lelaki tersebut, KGPH Hadiwinoto memiliki kesempatan lebih besar karena beberapa hal: pertama, dia merupakan satu-satunya adik kandung Sultan HB X; kedua, memiliki derajat kepangkatan tertinggi; serta ketiga, dalam struktur keraton, dirinya merupakan pemimpin (*lurah*) dari semua pangeran. Namun, prosesi kepangkatan sering kali tidak menjadi acuan yang mutlak. Sultan HB IX, sebelum menjadi sultan, memiliki pangkat yang lebih rendah daripada kakaknya, tetapi oleh Sultan HB VIII diberi keris Joko Piturun, yang merupakan keris putra mahkota. Namun, Sultan HB X tidak memilih dari 11 adiknya, tetapi memilih calon sultanah.

Walaupun tidak dikenal dalam tradisi Mataran Islam yang agraris, Sultan perempuan pernah memerintah di Aceh Dar al-Salam selama 55 tahun. Dalam studi doktornya, Khan (2009) menganalisis empat raja perempuan yang disebutnya sebagai sultanah, yaitu Tajul Alam Safiatuddin Syah, Nur Alam Naqiatuddin Syah, Inayat Zakiatuddin Syah, dan Kamalat Zaniatuddin Syah. Keempat sultanah tersebut mewarisi masa sulit ketika perusahaan Eropa, VOC, ataupun East India Company secara bertahap memperkuat posisi mereka di Sumatera. Akhirnya, keempat sultanah tersebut gagal mempertahankan dominasi Aceh yang mencapai puncak kejayaannya pada masa

Sultan Iskandar Muda, dua sultan sebelum Tajul Alam. Keempat sultanah tersebut tidak memiliki hubungan darah dan dipilih bergantung pada kontestasi politik di seputar singgasana sekaligus mengakhiri model pemilihan sultan berdasarkan pada hubungan darah. Kondisi tanpa hubungan darah ini diteruskan pada masa sultan laki-laki hingga Kasultanan Aceh dibubarkan Belanda pada awal abad ke-20. Lebih lanjut, Reid & Ito (1985) mencatat, munculnya sultanah memberikan alternatif bagi pemimpin despotik untuk Kasultanan yang berbasis pada perairan dan perdagangan. Pendapat lain dikemukakan Onghokham (2002, 75). Menurut Onghokham, karakter negara maritim tidak menempatkan sultan dalam posisi berkuasa penuh. Dalam kasus Aceh, para orang kaya (para saudagar) berkuasa di seputar singgasana dan memilih raja seorang perempuan karena alasan lebih mudah dipengaruhi dibandingkan laki-laki. Sultan tidak pernah memiliki otoritas penuh terhadap orang kaya di Aceh karena sumber ekonomi mereka bersifat bergerak (seperti emas dan perak), berbeda dengan sumber ekonomi agraris yang berupa tanah. Sementara untuk aristokrasi Islam yang berbasis agraris, tidak pernah muncul sultanah, kecuali pada periode Hindu-Buddha di Jawa. Dengan demikian, dalam konteks kerajaan Islam agraris, yang memiliki sumber ekonomi tidak bergerak berupa tanah dan kekuasaan raja bersifat mutlak, model sultanah sulit diterapkan dan tidak pernah terjadi sebelumnya.

MAKNA SIMBOLIS DAN POLITIS SABDA DAN DAWUH

Sultan HB X memperkenalkan tradisi baru berupa Sabda dan Dawuh, yaitu pengumuman formal di dalam Keraton Kasultanan. Sebelumnya, setelah proklamasi kemerdekaan, hanya dikenal maklumat, yang dilakukan dua kali, yaitu pada 5 September 1945, secara bersamaan tetapi terpisah oleh Sultan HB IX dan Paku Alam VIII. Sultan HB X dan Paku Alam VIII menegaskan diri sebagai bagian dari Republik Indonesia yang baru diproklamasikan dengan proviso tetap mengontrol dan memimpin wilayah tradisionalnya sebagai bagian istimewa dari Republik Indonesia (Kementerian Penerangan, 1957, 36). Maklumat kedua dikeluarkan sehari sebelum Soeharto jatuh pada 20 Mei 1998 secara bersamaan dan bersama-sama antara Sultan HB X dan Paku Alam VIII di Alun-alun Utara Yogyakarta. Kedua tokoh tradisional dan politik itu mendukung gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa.

Maklumat pertama mampu menegaskan eksistensi Kasultanan dan Pakualaman dalam republik. Kedua kerajaan tersebut bergabung untuk menjadi daerah istimewa. Sebaliknya, kedua pecahan Mataram di Solo tidak mampu dengan bijak mengantisipasi perubahan politik, kehilangan daerah istimewa dan tanahnya, serta menjadi pemain politik yang tidak diperhitungkan dan semakin kehilangan pengaruh. Ihwal kepawaiian Sultan HB IX dalam mempertahankan wilayah tradisionalnya tersebut, Monfries (2015, 123) menulis:

“Hamengkubuwono was a politically astute, non-ideological pragmatist who cleverly used his ascribed status as Sultan not only to support the Republican cause during the Revolution, but also to ensure his own political survival and, ultimately, to preserve his principality.”

Berkebalikan dengan dua maklumat, yakni pemimpin tradisional merespons perubahan yang terjadi di luar domain mereka, Sabda dan Dawuh justru merupakan pesan keluar yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di lingkup internal Kasultanan. Pada kedua maklumat, Indonesia dihadapkan pada perubahan sosial dramatis, yaitu proklamasi kemerdekaan dan gerakan reformasi. Sementara sebagian besar Sabda dan Dawuh

dikeluarkan pada saat tidak ada perubahan sosial di luar domain tradisional, tetapi muncul dinamika di dalam internal Kasultanan. Berikut ini perbandingan lima Sabda dan Dawuh yang dikeluarkan Sultan HB X sampai 2015.

Dari lima Sabda dan Dawuh di atas, bahasa simbolik yang ingin disampaikan Sultan HB X adalah sebagai berikut: Pertama, pengumuman yang sifatnya terbuka dilakukan di Bangsal Kencono di dalam kompleks Keraton, sedangkan yang bersifat tertutup dilaksanakan di Bangsal Manguntur Tangkil di kompleks Siti Hinggil. Siti Hinggil merupakan tempat untuk penobatan raja dan tata cara adat penting lainnya di Keraton. Keraton Yogyakarta merupakan kompleks yang luas, terdiri atas beberapa bagian yang merupakan kumpulan bangunan dan gedung. Kompleks Siti Hinggil berada di sebelah utara, sedangkan Bangsal Kencono terletak di tengah kompleks Keraton (Robson & Robson-McKillop, 2003). Saat ini, kompleks Siti Hinggil dikelola oleh Tepas (kantor) Keprajuritan, sedangkan kompleks Keraton dikelola oleh Tepas Pariwisata.

Kedua, dua Sabdatama ditujukan untuk merespons proses pembentukan UUK dan Perda Istimewa tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada Sabdatama 2012, Sultan HB X menegaskan sikap politiknya terhadap lambatnya proses pembahasan Rancangan UUK karena beberapa isu strategis, sedangkan perpanjangan masa jabatannya sebagai Gubernur DIY, yang sudah diperpanjang sejak 2008, segera berakhir (Dardias 2009, 2015d). Pada Sabdatama 2015, Sultan HB X merespons proses penyusunan perdais dan menghendaki dihapuskannya kata “istri” dalam persyaratan riwayat hidup calon Gubernur dan Wakil Gubernur DIY pada saat audiensi DPRD DIY di Keraton Kasultanan (“Polemik daftar rakyat”, 2015; Dardias, 2015e). Kata “istri” dipersepsikan bahwa seluruh raja Kasultanan dan Pakualaman adalah laki-laki, sedangkan Sultan HB X tidak memiliki putra dan merupakan hambatan bagi keinginannya untuk menempatkan putri sulungnya menjadi raja dan selanjutnya menjadi gubernur. Perbedaan paling mendasar dari Sabdatama 2012 dan 2015 terletak pada tingkat keberhasilan dan dampak kohesivitas internal dan eksternal. Sabdatama

Tabel 2. Dawuh dan Sabda Sultan Hamengkubuwono X

	Sabdatama I	Sabdatama II	Sabda Raja	Dawuh Raja	Dawuh Jejerung Raja
Diumumkan	Kamis, 10 Mei 2012	Jumat, 6 Maret 2015	Kamis, 30 April 2015	Selasa, 5 Mei 2015	Kamis, 31 Desember 2015
Selisih Waktu	-	1.030 hari	55 hari	5 hari	240 hari
Sifat	Terbuka	Terbuka	Tertutup	Tertutup	Tertutup
Tempat	Bangsals Kencono	Bangsals Kencono	Bangsals Manguntur Tangkil (Siti Hinggil)	Bangsals Manguntur Tangkil (Siti Hinggil)	Bangsals Manguntur Tangkil (Siti Hinggil)
Pakaian Sultan	Batik Peranakan+ Blangkon	Batik Peranakan + Blangkon	Kebesaran+ Kuluk Wakidan Biru	Kebesaran+ Kuluk Wakidan Biru	Batik Peranakan+ Blangkon
Isi Pokok	Menegaskan Kasultanan sebagai negara merdeka dan sudah selayaknya mendapatkan keistimewaan politik	Penerus tahta bisa lelaki atau perempuan dan sudah digariskan Dasar perubahan UUK adalah Sabdatama ini.	Mengganti gelar Sultan yaitu <i>Buwono</i> menjadi <i>Bawono</i> dan <i>Khalifatullah</i> Perjanjian Ki Ageng Giring dan Pemanahan sudah berakhir. Mengistirahatkan keris untuk Sultan (Kiai Kopek) dan keris Putra Mahkota (Kiai Joko Piturun)	Gelar <i>Gusti Kanjeng Ratu Pembayun</i> menjadi <i>Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng in Mataram</i> . GKR Mangkubumi duduk di <i>Watu Gilang</i> untuk penerus takhta.	Keturunan Sultan harus tunduk kepada perintah Sultan. Tidak tunduk kepada perintah Sultan akan diusir dari Mataram.
Kehadiran	GKR Emas Putri Dalem Adik Dalem PA IX	GKR Emas Putri Dalem Adik Dalem PA IX	GKR Emas, Putri Dalem KGPH Hadiwinoto GBPH Chandraningrat	GKR Emas Putri Dalem GBPH Chandraningrat	GKR Emas Putri Dalem GBPH Chandraningrat
Latar Belakang	Penyusunan RUUK	Penyusunan Perdais dan Suksesi	Suksesi	Suksesi	Suksesi
Target	Eksternal Keraton	Internal dan Eksternal Keraton	Internal Keraton	Internal Keraton	Internal Keraton
Dampak Internal	United	Divided	Divided	Divided	Divided
Dampak Eksternal	United	Divided	Divided	Divided	Divided
Keberhasilan	Berhasil (UUK disahkan)	Gagal (Perdais tidak menghapus kata “istri”)	Contested	Contested	Contested

*Tidak ada perbedaan signifikan tentang arti Sabda (proclamation) dan Dawuh (order) yang berarti perintah.

Sumber: kompilasi dari observasi penulis dan liputan media.

2012 berhasil mempercepat proses penyusunan RUUK yang akhirnya disahkan setahun berikutnya, sementara Sabdatama 2015 gagal memenuhi keinginan Sultan HB X untuk menghapus kata “istri”. Sabdatama 2012 berhasil mempersatukan elemen di bagian internal dengan eksternal Ka-

sultanan dalam kaitan dengan pentingnya UUK, sementara Sabdatama 2015 menciptakan segregasi internal dan eksternal yang akan dibahas di bagian selanjutnya.

Ketiga, dari sisi busana, Sultan HB X menggunakan “pakaian biasa”, berupa batik

peranakan dan tutup kepala model blangkon untuk merespons isu eksternal, tetapi justru menggunakan pakaian kebesaran Sultan HB X untuk merespons isu internal. Menariknya, tutup kepala/*kuluk* yang digunakan oleh Sultan HB X berwarna biru biasa dipakai adik-adik Sultan, dan tidak menggunakan *kuluk* warna hitam yang biasa digunakan raja seperti foto resmi Sultan HB X (Kraton Yogyakarta, 2002). Jika dipadukan dengan tempat dilangsungkannya acara, pakaian kebesaran Sultan dua kali digunakan di Siti Hinggil dan tidak pernah digunakan di Bangsal Kencono. Pada Dawuh Jejering Raja yang terakhir, Sultan HB X melakukan pengecualian dengan tetap memilih tempat di Siti Hinggil, tetapi menggunakan pakaian batik peranakan dengan blangkon. Dengan demikian, bisa ditarik kesimpulan bahwa secara simbolik, penggunaan pakaian kebesaran Sultan untuk merespons isu internal dan batik peranakan untuk isu eksternal menunjukkan isu internal terkait dengan suksesi lebih penting dibandingkan isu eksternal.

Keempat, tingkat kehadiran adik-adik Sultan HB X menurun dalam tiga pengumuman terakhir. Pada dua sabda yang terakhir, para adik Sultan menolak hadir karena yang mengundang adalah Sultan Hamengkubawono—bukan Hamengkubawono sebagaimana diumumkan dalam Sabda 30 April. Selain itu, PA IX tidak hadir saat Sabda 30 April dan Dawuh 5 Mei lantaran sedang dirawat di rumah sakit. Adapun putra mahkota Paku Alam, Kanjeng Bendara Pangeran Harya (KBPH) Suryodilogo, hadir dalam Sabda dan Dawuh selain Dawuh Jejering Raja pada 31 Desember. Beliau tidak hadir pada 31 Desember karena sedang mempersiapkan diri menjadi penguasa Pakualaman dalam Jumenengan Pakualaman 7 Januari 2016 (Dardias, 2016).

Kelima, Sabda dan Dawuh merupakan langkah Sultan HB X yang secara sistematis dan terstruktur mempersiapkan GKR Pembayun/GKR Mangkubumi menjadi raja. Pada Sabda 6 Maret, Sultan HB X menegaskan bahwa perintah utama berasal dari raja dan penerus kerajaan bisa laki-laki dan perempuan. Dua bulan setelahnya, beliau mengganti nama dan mengistirahatkan dua simbol lelaki sebagai raja, yaitu Keris Kiai Kopek dan Keris Kiai Joko Piturun. Berubahnya gelar “khalifatullah” yang diidentikkan dengan

laki-laki, karena semua nabi dalam Islam adalah laki-laki, memberi peluang GKR Mangkubumi untuk menjadi sultanah. Selain itu, dalam tradisi Mataram, keris hanya digunakan untuk laki-laki, sedangkan perempuan menggunakan semacam keris kecil yang disebut *cundrik* (Harsrinuksmo, 2004). Berbeda dengan kerajaan Barat, yang simbolisasi rajanya dilakukan dengan pemberian mahkota, dalam kerajaan Jawa dilakukan dengan cara mengganti keris dengan Keris Kiai Kopek yang khusus digunakan oleh sultan. Maka, setelah hambatan kultural paling penting disingkirkan, Sultan HB X baru mengumumkan putri mahkota pada 5 Mei 2015. Dilihat dari rentetan peristiwa tersebut, tampak bahwa langkah-langkah tersebut merupakan langkah sistematis dan terukur pertama kali dengan mengubah tradisi suksesi, dilanjutkan dengan pengumuman penerus perempuan, walaupun pengistirahatan keris bertentangan dengan tradisi suksesi yang selama ini berlangsung.

Keenam, tidak ada perhitungan pasti ihwal hari dan selisih Sabda dan Dawuh. Pemberitahuan tentang Sabda dan Dawuh dilakukan beberapa jam sebelum diumumkan sekitar pukul 10.00 sehingga semua yang hadir dalam Sabda dan Dawuh baru mempersiapkan diri pagi harinya. Hal ini menciptakan kesibukan karena baju yang digunakan keluarga kerajaan harus mengikuti pakaian yang dikenakan raja. Hal ini juga yang menjadi alasan beberapa adik Sultan yang berada di Jakarta tidak hadir dalam acara tersebut (“GKR pembayun jadi”, 2015).

Langkah-langkah sistematis Sultan HB X mempersiapkan GKR Mangkubumi menjadi sultanah mendapat tantangan keras dan menciptakan dua kubu yang berkonflik. Kubu pertama, yang terdiri atas Sultan, permaisuri, putri, dan menantunya, berseberangan dengan adik-adik Sultan yang akan dianalisis dalam bagian berikutnya.

GAGALNYA LEGITIMASI LANGIT YANG MENYEBABKAN KONFLIK INTERNAL

Konflik internal menjadi masalah paling serius dalam aristokrasi modern. Ancaman dari luar, seperti perang sebagaimana terjadi pada masa lalu, sulit ditemukan saat ini ketika aristokrasi menjadi bagian dari sistem politik negara.

Konflik internal ini menjadi persoalan di banyak aristokrasi yang masih bertahan di Indonesia. Pada Kasultanan yang menjadi bagian dari sistem politik Indonesia melalui UUK, konflik internal tidak menjadi bagian yang diatur negara. Pada saat bersamaan, tidak ada institusi lain yang mampu menjadi penengah jika konflik ini terjadi.

Aristokrasi di Indonesia dihadapkan pada persoalan konflik internal yang pelik. Di Kasunanan Solo, saudara tua Kasultanan, konflik internal terjadi setelah wafatnya Sunan Pakubuwono XII. Setelah penobatan Sunan Pakubuwono XIII Hangabehi, yang merupakan anak tertua dari 35 anak Sunan Pakubuwono XII, Kanjeng Gusti Pangeran Harya Panembahan Agung (KGHPA) Tejowulan, yang merasa dirinya lebih cakap dibandingkan kakaknya, menobatkan diri. Walaupun kedua sunan sudah bersepakat untuk bersatu dan Tejowulan menjadi Mahapatih, konflik tidak berhenti karena adik Hangabehi, GKR Murtiyah Wandansari (Gusti Moeng), menggagalkan pelantikan Tejowulan dan menguasai Keraton Surakarta sampai saat ini (Alim, 2013; Ismaniyah, 2013). Di Kasultanan Ternate, istri keempat mendiang Sultan Mudaffar Syah, Boki Nita Budhi Susanti, menjadi akar masalah suksesi karena mengaku memperoleh dua anak kembar lelaki dari suaminya. Saat ini dirinya ditetapkan menjadi tersangka pemalsuan identitas bayi kembar di tengah suksesi Kasultanan Ternate (“Bobato Siapkan Pemilihan”, 2016). Di Kerajaan Gowa, Sulawesi Selatan, dua kakak-adik Andi Maddusila Andi Idjo dan Andi Kumala Idjo berebut takhta Gowa, salah satunya bertujuan memenangi pilkada Gowa (Baharuddin, 2014). Andi Maddusila gagal menjadi bupati untuk ketiga kalinya dalam pilkada 2015.

Konflik internal di Kasultanan diakibatkan oleh Sabda dan Dawuh Sultan HB X karena memilih putri sulungnya menjadi sultanah. Krisis mencari penerus Sultan HB X diselesaikan bukan dengan memilih salah satu dari 11 adik laki-lakinya, melainkan meneruskan kursi raja ke anak perempuannya. Perbedaan pendapat tajam terjadi di antara keturunan Sultan HB IX, dan sumber serta pendiriannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sultan HB X menganggap bahwa beliau menjalankan perintah dari Tuhan dan leluhur sebagai basis legitimasi mistisisme. Beliau merasa memperoleh pesan dari leluhur untuk mengganti gelar Sultan dan memilih putri sulungnya menjadi penerus. Sabda Raja 30 April 2015 tiga kali mengulang bahwa perubahan gelar Sultan merupakan petunjuk dari Allah (lihat Tabel 3). Menurut Sultan HB X, aturan tertinggi dalam kerajaan adalah titah/perintah raja. Itulah aturan main/*paugeran* tertinggi yang harus diikuti oleh seluruh komponen Kasultanan, termasuk warga Yogyakarta. Inilah *rule*, sebagaimana didefinisikan oleh Munck (1996) dan Beetham (1991), yang harus diikuti dan dipatuhi. Kasultanan harus merespons zaman yang berubah, dan salah satu bentuk respons tersebut adalah memberikan kekuasaan kepada perempuan. Siapa pun raja berikutnya bergantung pada raja yang bertakhta (Dardias, 2015d). Penggunaan basis mistisisme tampak jelas dalam bunyi Sabda Raja 30 April dan Dawuh Raja 5 Mei pada Tabel 3.

Sementara itu, adik-adik Sultan HB X mempunyai pendapat yang berseberangan dengan kakak tertua mereka, berbasis pada argumentasi historis, adat, dan budaya. Sultan adalah pelaksana dari *paugeran* (aturan main) yang telah dibuat oleh leluhur mereka dan sudah bertahan sejak 1755. Artinya, siapa pun sultan yang bertakhta harus mengikuti prinsip patriarkal yang menjadi fondasi utama kerajaan dalam menentukan pemimpin. Ketiadaan putra bukan halangan dalam sistem patriarkal karena pernah terjadi sebelumnya, takhta menurun ke adik laki-laki jika sultan tidak memiliki putra. (Dardias, 2014, 2015b, 2015c).

Selain pertimbangan dominasi laki-laki, historis, dan budaya, konflik di Kasultanan lebih disebabkan oleh hilangnya sistem untuk memilih pemimpin tanpa adanya sistem lain yang ditawarkan Sultan HB X. Kasultanan, sebagaimana aristokrasi lainnya, menggunakan hubungan darah sebagai sistem politik mereka. Jauh-dekatnya hubungan dengan sultan sebagai pusat kekuasaan ditentukan oleh jarak hubungan darah dengan sultan. Penerus dalam aristokrasi dapat diketahui ketika mereka dilahirkan. Sebagai perbandingan dalam politik modern, pemilu digunakan untuk memilih presiden. Sabda dan Dawuh Sultan HB

Tabel 3. Penggunaan Legitimasi Langit dalam Sabda Raja dan Dawuh Raja

Sabda Raja 30 April 2015	Dawuh Raja 5 Mei 2015
<p>Gusti Allah, Gusti Agung, Kuoso Cipto. Kawuningono siro kabeh Abdiningsun, putri dalem, sederek dalem, sentono dalem lan abdi dalem nompowening dawuh Gusti Allah, Gusti Agung, Kuoso Cipto lan romoningsun, eyang-eyang ingsun poro leluhur Mataram. Wiwit waktu iki, ingsun nompowening dawuh kanugrahan, dawuh Gusti Allah, Gusti Agung, Kuoso Cipto asmo kelenggahan ingsun, <i>Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuhun Sri Sultan Hamengkubawono Inggang Jumeneng Kasepuh Suryaning Mataram Senopati ing Ngalogo Langgenging Bawono Langgeng, Langgenging Toto Panotogomo.</i> Sabdo Rojo iki perlu dimangerteni, diugemi lan ditindakake yo mengkonowening sabdoningsun.</p>	<p>Siro abdi ingsun, seksenono Inggang; <i>Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuhun Sri Sultan Hamengkubawono Inggang Jumeneng Kasepuh, Suryaning Mataram, Senopati ing Ngalogo Langgenging Bawono Langgeng, Langgenging Toto Panotogomo</i> Kadawuhan netepake putriningsun <i>Gusti Kanjeng Ratu Pembayun</i> katetepake <i>Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram.</i> Mangertenono yo mengkonowening dawuh ingsun.</p>
<p>Gusti Allah, Gusti Agung, Kuasa Cipta Untuk kalian ketahui semua Abdi saya, putri Sultan, Saudara Sultan, Kerabat Sultan dan Abdi Dalem Menerima perintah Gusti Allah, Gusti Agung, Kuasa Cipta dan ayah saya, kakek-kakek saya para leluhur Mataram. Mulai saat ini, saya menerima perintah kehormatan, Perintah Gusti Allah, Gusti Agung, Kuasa Cipta Nama kedudukan saya, <i>Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuhun Sri Sultan Hamengkubawono Inggang Jumeneng Kasepuh Suryaning Mataram Senopati ing Ngalogo Langgenging Bawono Langgeng, Langgenging Toto Panotogomo.</i> Sabda Raja ini perlu dipahami, dipegang teguh, dan dilaksanakan. Begitulah Sabda saya.</p>	<p>Kalian abdi saya, saksi Saya: <i>Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuhun Sri Sultan Hamengkubawono Inggang Jumeneng Kasepuh, Suryaning Mataram, Senopati ing Ngalogo Langgenging Bawono Langgeng, Langgenging Toto Panotogomo</i> Diminta untuk menetapkan putri saya, <i>Gusti Kanjeng Ratu Pembayun</i> Ditetapkan <i>Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi Hamemayu Hayuning Bawono Langgeng ing Mataram.</i> Pahamilah, ya begitulah perintah saya.</p>

Sumber: Penjelasan Sabda Raja dan Dawuh Raja oleh Sultan HB X di Ndalem Wironegaran pada 8 Mei 2016 (Hamengkubuwono X, 2015b).
Translasi oleh penulis.

X dapat diibaratkan sebagai upaya untuk menghapus pemilu dalam politik modern. Masalahnya, Dawuh Sultan HB X selama lima menit berusaha menghapus fondasi selama 250 tahun tanpa memberikan alternatif sistem lainnya untuk memilih pemimpin. Pertanyaan sederhana sebagai konsekuensi perubahan sistem ini adalah hilangnya kemampuan Kasultanan memilih pemimpin karena hilangnya garis laki-laki. Keturunan GKR Mangkubumi dalam tradisi patriarkal adalah anak dari suaminya, KPH Wironegoro, bukan berasal

dari nasab Sultan HB X dan leluhur Mataram sejak Sultan Hamengkubuwono I/Pangeran Mangkubumi. Sebelum menjadi suami GKR Mangkubumi, KPH Wironegoro tidak memiliki darah bangsawan Jawa.

Penjelasan pada 8 Mei 2015, tiga hari setelah Dawuh Raja, Sultan HB X hanya memberikan alasan bagi munculnya Sabda dan Dawuh menggunakan pendekatan mistis tanpa menjelaskan konsekuensi logis dari pilihan politik tersebut. Publik mempertanyakan siapa yang akan

menjadi Sultan HB XII pengganti GKR Mangkubumi apabila akhirnya dapat menjadi sultanah? Bagaimana dengan konsekuensi Sultan menjadi Gubernur DIY ketika tekanan politik Sultan gagal menghapus kata “istri” dalam perdais? Padahal Sultan yang bertakhta secara otomatis akan menjadi Gubernur DIY sesuai dengan amanat UUK. Penjelasan logis mengenai Sabda dan Dawuh sulit didapatkan karena basis legitimasi yang paling mungkin didapatkan adalah dengan basis legitimasi langit, menyitir saran dari leluhur melalui proses gaib sebagaimana dibahas di bagian berikut ini.

LEGITIMASI LANGIT DAN MELEMAHNYA REZIM

Kasultanan Yogyakarta selalu menggunakan basis legitimasi langit/gaib untuk menciptakan legitimasi politik sebagaimana dilihat dalam Sabda Raja. Sultan HB X juga menegaskan bahwa dirinya hanya sekadar menjalankan perintah Gusti Allah melalui para leluhur. Legitimasi langit ini digunakan untuk menciptakan dukungan politik sekaligus dengan ancaman siapa saja yang tidak melaksanakan perintah “*mesti lebur digulung jagad*” (akan hancur digulung semesta) (Dardias, 2015d). Sultan HB X juga ingin memberikan kesan bahwa perintah langit tersebut mendadak serta harus segera diumumkan dan dilaksanakan sehingga pengumuman ihwal Sabda dan Dawuh baru dilakukan beberapa jam sebelumnya. Ketika dalam dialog muncul pertanyaan apakah akan ada Sabda atau Dawuh lagi, Sultan HB X menjawab, “Tanya Gusti Allah yang Mahakuasa, jangan tanya saya, saya hanya *nglaksanaake Dawuh* (menjalankan perintah Tuhan) kok. Tinggal kamu percaya tidak, hanya itu saja, itu urusan kamu bukan urusan saya” (Dardias, 2015d).

Mistisisme yang dipraktekkan di Kasultanan Yogyakarta serta menjadi bagian dari legitimasi Sabda dan Dawuh sebagaimana dibahas oleh (Mulder, 2005; 1998; Woodward, 1989) mendapatkan tempat dalam masyarakat tradisional yang cenderung irasional tetapi kesulitan mencari pendukung dalam masyarakat rasional. Maka, pemilihan GKR Mangkubumi tidak mendapatkan sambutan di masyarakat, tetapi miskin legitimasi, baik internal maupun

eksternal. Secara internal, adik-adik Sultan HB X menentang Sabda dan Dawuh Raja, sedangkan secara eksternal, penolakan dilakukan oleh komunitas Islam modernis ataupun Islam tradisional yang menunjukkan melemahnya rezim politik Sultan HB X.

Adik-adik Sultan yang menentang Sabda dan Dawuh dipelopori oleh tiga orang, yaitu GPBH Prabukusumo, serta adik kandungnya, GBPH Yudhaningrat; dan adik kandung Sultan HB X, KGPH Hadiwinoto. Penolakan dari ketiga adik ini penting karena ketiganya merupakan pejabat pokok dari struktur institusi birokrasi Kasultanan (Hamengkubuwono X, 1999). Kasultanan Yogyakarta terdiri atas 21 kantor serta biro operasional dan fungsional yang dikoordinasikan oleh empat “kementerian koordinator”. Tiga dari empat kementerian koordinator tersebut dipimpin oleh tiga adik Sultan HB X, yaitu KGPH Hadiwinoto (*Kawedanan Hageng Punakawan Parasraya Budaya*) yang mengurus tanah, transportasi, keamanan, dan perbekalan; GBPH Yudhaningrat (*Kawedanan Hageng Punakawan Parwo Budaya*), yang mengurus keagamaan, makam, dan kesenian; serta GBPH Prabukusumo (*Kawedanan Hageng Punakawan Nitya Budaya*), yang mengurus perlengkapan upacara museum dan pariwisata. Selain itu, KGPH Hadiwinoto merupakan pemimpin (*pengageng*) di *Kawedanan Hageng Punakawan Panitikismo*, yang mengurus pertanahan; dan GBPH Yudhaningrat merupakan *Manggala Yudha* atau Panglima Perang Kasultanan Yogyakarta. Melalui pesan singkat yang ditujukan ke publik, GBPH Prabukusumo menulis:

“*MASYARAKAT KEDAH GUMREGAH!!! Ayo Bareng Bareng Pada Njegake Jejege Pugeran, Dudu Njegake Jejege Kekarepan. Bakal Kena Bebendu Seko Gusti ALLAH Swt. Uga Saka Para Leluhur Dalem. Titenana. Becik Ketitik Ala Keta- ra!!! Ngerso Dalem Kudu Nyuwun Pangapuro Dumateng Gusti ALLAH Swt., Mergo Ora Gelem Ngagem Khalifatullah Sarta Assalamualaikum Ing Kraton. Uga Nyuwun Pangapuro Dumateng Umat Islam Sarta Masyarakat. Ora Usah Nyuwun Pangapuro Karo Rayi-Rayi Dalem. Kabeh Wis Ngapuroni. Kudu Bali Neng Pugeran Ndalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Rayi Rayi Dalem Masrahke Dumateng Warga Masyarakat Ing Ngayogyakarta Hadiningrat Arep Diapakke.*

Sumangga Warga Ingkang Duweni Ati, Pikiran Sarta Niat Ingkang Luhur. Warga Sing Ndukung Tumindak Ala Ben Kena Lan Ngrasake Ulah Karmane Dewe. ("Gusti Prabu Minta", 2015)

(MASYARAKAT HARUS BERGERAK!!! Ayo bersama-sama menegakkan tegaknya Pugeran, bukan menegakkan tegaknya kemauan. Akan kena hukuman dari Gusti ALLAH Swt. juga dari para leluhur (para raja sebelumnya). Perhatikanlah. Yang baik akan ditandai, yang buruk akan terlihat!!! Ngarso Dalem (Sultan HB X) harus minta maaf kepada ALLAH Swt., karena tidak mau menggunakan Khalifatullah dan Assalamualaikum di Kraton. Juga minta maaf kepada umat Islam dan masyarakat. Tidak perlu minta maaf kepada adik-adik Sultan. Semua (adik-adik Sultan) sudah memaafkan. Harus kembali ke Pugeran Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Adik-adik Sultan menyerahkan kepada warga masyarakat di Ngayogyakarta Hadiningrat akan diapakan. Silakan warga yang masih memiliki hati, pikiran serta niat yang luhur. Warga yang mendukung perbuatan tercela akan terkena dan merasakan balasan karmanya sendiri).

Penolakan terhadap Sabda dan Dawuh Raja dilakukan oleh adik-adik Sultan walaupun mereka masing-masing memiliki pendirian politik berbeda yang didasari oleh garis ibu. Pada 10 Mei 2015, adik-adik Sultan HB X dari ibu Ciptomurti, yang berdomisili di Jakarta, membuat *press release* menolak Sabda dan Dawuh Raja dengan tidak mengakui Sultan Hamengkubawono dan Putri Mahkota (Pakuningrat, 2015). Garis ibu Hastungkara (ibu Prabukusumo dan Yudhaningrat) tidak mengeluarkan surat pernyataan serupa lantaran salah satu adik lelaki mereka, GBPH Chandraningrat, terlihat mendukung Sultan HB X karena selalu hadir dalam setiap Sabda dan Dawuh. Sementara garis ibu Windyaningrum dan Pintokopurnomo tidak mengeluarkan surat karena hanya menyisakan masing-masing satu laki-laki, KGPH Hadiwinoto dan GBPH Hadisuryo.

Respons berbeda dilakukan oleh keturunan Sultan HB IX pada Sabda 31 Desember 2015. Mereka bersatu menolak Sabda dan Dawuh yang dikeluarkan sepanjang 2015. Pada Surat Terbuka 12 Januari 2016, putra-putri Sultan HB IX mengeluarkan tiga sikap: pertama, Sultan bukan pemilik keraton, melainkan sebagai pemimpin adat sehingga harus menyesuaikan dengan *pugeran* Keraton. Kedua, suksesi harus

disesuaikan dengan *pugeran* Keraton. Ketiga, Sultan yang bertakhta saat ini adalah Sri Sultan Hamengkubuwono X sehingga sabda selain menggunakan nama tersebut tidak memiliki legitimasi. Surat Terbuka ini ditandatangani oleh putra-putri tertua dari masing-masing ibu (Murdokusumo, Hadiwinoto, Prabukusumo, & Pakuningrat, 2015).

Penolakan dari adik-adik Sultan HB X ini menjadi bukti melemahnya rezim Sultan HB X secara internal. Mengutip Munck (1996) dan Beetham (1991) sebagaimana dibahas di awal tulisan, Sultan HB X tidak mampu menentukan aktor politik yang menduduki jabatan sebagai putri mahkota, dan aturan main yang diterapkannya tidak diikuti anggota rezim. Metode Sabda dan Dawuh yang digunakan untuk melegitimasi tindakan politisnya mendapatkan tantangan anggota inti rezim, dalam hal ini adik-adik kandung dan tirinya. Pemimpin rezim gagal mengontrol dan memastikan pilihan politiknya menjadi aturan main yang disepakati anggota inti rezim aristokrasi sehingga yang terjadi adalah delegitimasi Sultan HB X.

Selain itu, melemahnya daya kontrol rezim terlihat dari tidak adanya sanksi bagi anggota inti rezim yang menolak aturan main. Sampai saat ini, ketiga adik Sultan HB X masih menduduki posisi yang sama di birokrasi internal Kasultanan dibandingkan sebelum mereka menolak Sabda dan Dawuh. Merekalah yang memegang peranan penting terkait dengan sumber ekonomi Keraton (yang antara lain didapatkan dari ekstraksi tanah dan pariwisata), sumber budaya Keraton, serta angkatan bersenjata. Seluruh urat nadi pemerintahan Kasultanan secara praktis tetap dijalankan oleh para penentang rezim. Satu-satunya "menteri koordinator" yang berada di bawah kontrol Sultan adalah Kawedanan Hageng Punakawan Panitrapura, yang membawahkan administrasi dan keuangan Kasultanan yang dijabat oleh putri kedua Sultan, GKR Condrokirono.

Melemahnya rezim Sultan HB X juga dilihat dari penentang di eksternal Kasultanan. Para penentang Sabda dan Dawuh menguat seiring dihilangkannya kata "khalifatullah" dalam gelar Sultan. Gelar lengkap sebelumnya, yaitu "*Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing*

Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Inggang Jumeneng Kaping Sedasing Ngayogyakarta Hadiningrat”, berubah menjadi “*Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Inggang Sinuhun Sri Sultan Hamengkubawono Inggang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram Senopati ing Ngalogo Langengging Bawono Langgeng, Langgenging Toto Panotogomo*” (Hamengkubawono X, 2015b). Kondisi yang mirip dapat dipersamakan dengan Pangeran Charles di Inggris, yang meningkatkan tensi politik ketika pada 2002 dia mengatakan jika diangkat sebagai Raja akan menjadi *Defender of Faiths* daripada *Defender of the Faith*, yang hanya merujuk ke satu agama, Nasrani (Abell & Stevenson, 2011).

Salah satu penentang eksternal paling kuat dari Sabda dan Dawuh Sultan HB X adalah komunitas Islam di Kauman Yogyakarta yang berada di halaman depan Kasultanan. Kauman adalah komunitas yang menopang sisi keislaman Kasultanan dan menjadi penjaga Masjid Gedhe Kasultanan. KH Ahmad Dahlan, misalnya, adalah tokoh Kauman abdi dalem Kasultanan yang dibiayai untuk belajar agama dan berhaji ke Mekah sebelum mendirikan Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar kedua. Dalam selebarannya, Amali (2015) menganggap Sabda dan Dawuh bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Gerakannya menuntut dikembalikannya *paugeran* yang selama ini dianut Kasultanan.

Penolak lainnya berasal dari Islam tradisional yang bergabung dalam dua organisasi Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. NU wilayah Yogyakarta khawatir Sultan dibisiki setan sehingga menolak Sabda Raja. Dalam konferensi persnya, Jadul Maula, Wakil NU DIY, mengatakan, “Klaim itu dikhawatirkan bersifat distortif, mengandung ilusi syaithoniyah, dan sarat kepentingan pribadi” (JPPN, 2015). Sama dengan komponen di Kauman, NU ulama berpandangan bahwa klaim Sultan HB X, yang menyebutkan penggantian nama dan penunjukan putri mahkota sebagai perintah dari Gusti Allah, menyesatkan dan menyimpang dari akidah Islam. Sementara Ketua Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Heni Astriyanto, tidak setuju dengan perubahan gelar Sultan. Dia mengatakan, “Penghapusan gelar pemimpin agama itu praktis mengubah pakem Keraton Yogya yang selama ini beridentitas

sebagai Kerajaan Mataram Islam.” Tentang raja perempuan, Heni menolak, “Kami tak setuju (raja perempuan), bukan bicara soal kesetaraan, namun pakem adatnya” (Wicaksono, 2015).

Penolakan juga dilakukan oleh elemen masyarakat yang menjadi pendukung Sultan HB X pada saat pembahasan RUUK. Elemen-elemen masyarakat ini memiliki peran signifikan dalam menuntut penetapan Sultan sebagai Gubernur, terutama terkait dengan aksi-aksi politis di Yogyakarta. Ketua Paguyuban Dukuh Gunungkidul Janaloka, Sutiyono, mengatakan, “Tak hanya masyarakat kota, di desa pun alasan itu tetap tak bisa diterima.” Pendapat serupa diutarakan Mohammad Zuhud, Koordinator Paguyuban Seksi Pengamanan Keraton (Paksi Katon), yang berpendapat bahwa alasan wahyu sebagai kemunculan Sabda Raja adalah omong kosong (Zakaria, 2015). Sementara Sukiman, Ketua Paguyuban Dukuh DIY Semar Sembogo, mengatakan, “Ya kalau namanya, Sayidin Panatagama itu namanya imam, selama berkaitan dengan ‘din’, yaitu agama (Islam), imam itu kan kakung (laki-laki)” (Siswoyo & Waskita, 2015).

Penolakan eksternal ini menjadi tanda melemahnya rezim karena keputusan pemimpin rezim tidak menjadi *shared beliefs* yang disepakati dan diikuti dengan aksi. Legitimasi langit yang digunakan sebagai basis politik pembenaran Sabda dan Dawuh gagal diikuti sebagai aturan main yang disepakati anggota luar rezim yang semakin rasional. Ditambah dengan gagalnya keinginan Sultan HB X untuk menghapus kata “istri” sebagai persyaratan riwayat hidup calon gubernur, rezim aristokrasi Sultan HB X tidak mendapatkan legitimasi politik.

Perlawanan terhadap dominasi mistis-religius yang dilakukan Sultan HB X oleh masyarakat tradisional-irasional dilakukan dengan menggunakan pertanda alam dan bencana. Bagi masyarakat tradisional-irasional, peristiwa alam (yang sebenarnya normal terjadi) dipersepsikan sebagai penolakan atau persetujuan alam terhadap apa yang terjadi di lingkungan Kasultanan. Tumbangnya pohon dan retaknya makam yang akan digunakan Sultan HB X dimaknai sebagai pertanda bahwa Sabda dan Dawuh, yang dilakukannya tidak mendapatkan legitimasi langit. Pada

3 Februari 2016, Pohon Preh (*Ficus ribes* Reinw), yang berusia ratusan tahun setinggi lebih dari 10 meter, tumbang di halaman Bangsal Pracimantoro. Walaupun sangat sering terjadi pohon-pohon tua tumbang di tengah musim hujan yang disertai angin, masyarakat menganggap ada pertanda alam yang disampaikan melalui pohon tumbang tersebut (“pohon keramat keraton”, 2016). Tiga minggu setelahnya, dinding di kompleks pemakaman raja Mataram di Imogiri Bantul retak. Di kompleks ini, rencananya akan dimakamkan Sultan HB X. Beberapa minggu sebelumnya, bagian di sekitar kompleks mengalami perbaikan dan diguyur hujan terus-menerus (“Lokasi calon makan”, 2016). Bagi kalangan rasional, kedua peristiwa tersebut tidak memiliki makna terhadap Sabda dan Dawuh. Namun, bagi kalangan tradisional-irasional, kedua peristiwa tersebut digunakan untuk mempertanyakan kebijakan Sultan HB X. Penggunaan kata “pohon keramat” dan pertanyaan “pertanda apa?” dalam judul di media *Kedaulatan Rakyat* menunjukkan bukti upaya penulis berita berusaha menghubungkan kedua peristiwa tersebut dengan konstelasi internal Kasultanan sesuai dengan selera sebagian besar pembacanya.

PENUTUP

Kekuatan rezim aristokrasi Sultan Hamengkubuwono X, dilihat dari implikasi dan respons terhadap Sabda dan Dawuh Raja yang dikeluarkan selama 2015, mengalami pelemahan. Seleksi pemimpin politik dalam rezim aristokrasi yang tersusun atas sistem politik piramida menempatkan Sultan sebagai pemimpin tertinggi rezim, tidak berhasil memperkuat rezim, tetapi justru melemahkannya. Dalam rezim aristokrasi yang efektif, hegemonik, dan kuat, keputusan pemimpin rezim menjadi aturan main yang disepakati bersama oleh anggota rezim dan ditunjukkan dengan aksi dukungan yang nyata. Pemimpin politik rezim aristokrasi mampu mengontrol anggota rezim untuk menduduki posisi-posisi politik tertentu. Sabda dan Dawuh Sultan HB X selama 2015 menunjukkan melemahnya rezim, baik internal di dalam keluarga inti Kasultanan maupun eksternal di masyarakat Yogyakarta, karena aturan main untuk menunjuk putri sulungnya sebagai penerus rezim politik aristokrasi mendapatkan tentangan.

Penolakan terhadap aturan main Sultan HB X tidak hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tetapi melalui penolakan terbuka yang menunjukkan delegitimasi tengah terjadi.

Melemahnya rezim aristokrasi Sultan HB X disebabkan oleh gagalnya legitimasi langit sebagai basis legitimasi politik. Dari sisi internal, legitimasi langit tidak mampu melawan tradisi dan adat sistem pemilihan Sultan yang sudah berlangsung selama dua ratus tahun lebih. Dari sisi eksternal, penolakan terhadap legitimasi langit yang berbasis pada mistisisme tidak menemukan tempat di tengah masyarakat yang semakin rasional dan ajaran agama Islam.

Implikasi praktis melemahnya rezim politik Sultan HB X adalah masa depan integrasi Kasultanan dan Pakualaman dalam struktur politik modern. UUK mengasumsikan persoalan mengenai suksesi merupakan bagian internal Kasultanan dan Pakulaman, dan dalam hal ini pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan melakukan intervensi. Apabila Sultan berhalangan, posisi gubernur dipegang oleh Paku Alam yang bertakhta yang dapat menduduki jabatan gubernur tanpa batas waktu definitif.

Namun, walaupun terdapat pelemahan rezim Sultan HB X, terutama dari sisi internal, Kasultanan secara institusional dan aristokrasi secara umum tetap memiliki pengaruh yang sangat kuat secara politik di Yogyakarta. Hal ini terjadi karena Kasultanan tetap mengontrol basis-basis ekonomi aristokrasi berupa tanah yang menjadi kewenangan istimewa bagi DIY sebagaimana yang diatur dalam UUK. Basis ekonomi material berupa tanah tetap dikontrol oleh Kasultanan sebagai bagian dari aristokrasi agraris sehingga delegitimasi yang terjadi terhadap pribadi Sultan HB X tidak secara otomatis menjadikan legitimasi terhadap Kasultanan menurun.

PUSTAKA ACUAN

- Abell, J., & Stevenson, C. (2011). Defending the faith(s)? Democracy and hereditary right in England. *Political Psychology*, 32(3), 485–504.
- Alim, A. (2013). Gusti Moeng tuding sikap raja biang prahara keraton. Diakses 3 Februari 2016 dari <http://daerah.sindonews.com/read/775492/22/gusti-moeng-tuding-sikap-raja-biang-prahara-keraton-1377504663>.

- Amali, H. S. (2015). *Islah itu mulia*. Yogyakarta.
- Baharuddin. (2014, 5 Juni). Maddusila jadi Raja Gowa ke-37. *Koran Sindo*.
- Bappeda DIY. (2014). Luas wilayah garis pantai. Diakses 2 Februari 2016 dari http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_profil/html-2print/441/0/2/2010-2014.
- Bastin, J. S., & Benda, H. J. (1968). *A history of modern southeast Asia: Colonialism, nationalism, and decolonization*. Sydney: Prentice-Hall.
- Beetham, D. (1991). *The legitimation of power*. Humanities Press International.
- _____. (2013). *The legitimation of power*. Palgrave.
- Blak-blakan dengan Sultan. (2007). *Kick Andy Metro TV*.
- Bobato siapkan pemilihan sultan Ternate. (2016, 3 Februari). *Malut Post*, hlm. 1.
- Brauchler, B. (2011). Kings on stage: Local leadership in the post-Suharto mollucas. *Asian Journal of Social Science*, 39, 196–218.
- Buehler, M., & Tan, P. (2007). Party-candidate relationship in Indonesian local politics: A case study of the 2005 regional elections in Gowa, South Sulawesi Province. *Indonesia*, 84(Oktober), 41–69.
- Cribb, R. B. (2006). Indonesia: back on the throne. *Asia Current*, February 2006.
- Cribb, R. B., & Brown, C. (1995). *Modern Indonesia: A history since 1945*. London: Longman.
- Dardias, B. (2009). Yogyakarta in decentralized Indonesia: Integrating traditional institution into democratic transitions. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 13(2).
- _____. (2014, 24 Desember). GBPH Prabukusumo (interview). Yogyakarta.
- _____. (2015a). Siapa sosok HB XI? Diakses 30 Februari 2016 dari <http://bayudardias.staff.ugm.ac.id/2015/03/24/siapa-sosok-hb-xi/>.
- _____. (2015b, 7 Januari). GBPH Yudhaningrat (interview). Yogyakarta.
- _____. (2015c, 14 Februari). KGPH Hadiwinoto (interview). Yogyakarta.
- _____. (2015d, 3 March). Hamengkubuwono X (interview). Yogyakarta.
- _____. (2015e, 7 Maret). Polemik riwayat hidup. *Kedaulatan Rakyat*, p. 1. Diakses 30 Februari 2016 dari <http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/3857/polemik-riwayat-hidup.kr>
- _____. (2016, 28 Januari). Paku Alam X (interview). Sleman Legge, J. D. (1980). *Indonesia*. Sydney: Prentice-Hall.
- Dwipayana, A. A. (2004). *Bangsawan dan kuasa: Kembalinya ningrat di dua kota*. Yogyakarta: IRE Press.
- Murdokusumo, G.B.Ray., Hadiwinoto, K.G.P.H., Prabukusumo G.B.P.H., & Pakuningrat, G.B.P.H. (2015). *Surat terbuka untuk ngarso dalem* [Press release].
- GKR pembayun jadi GKR Mangkubumi. (2015, 6 Mei). *Tribun Jogja*.
- Gusti Prabu minta masyarakat gumregah. (2015, 6 Mei). Dikutip dari www.radarjogja.co.id: <http://www.radarjogja.co.id/gusti-prabu-minta-masyarakat-gumregah/>
- Hamengkubuwono X. (1999). Pranatan tata rakite peprintahan karaton Ngayogyakarta Hadiningrat (struktur pemerintahan Keraton Yogyakarta). Dawuh Dalem No. 01/DD/HB.X/EHE-1932/1999.
- Hamengkubuwono X. (2015a). Penjelasan Sabda Raja dan Dawuh Raja [Press release].
- _____. (2015b). Sabda Raja [Press release].
- Harjono, S. (2012). *Kronik suksesi keraton Jawa 1755–1989*. Yogyakarta: Polgov JPP Fisipol UGM.
- Harsono, D. (2011). *To reign for the people: Exercising the “democratic monarchy” in Yogyakarta*. (Master of Arts Thesis), Institute of Social Studies, The Hague.
- Harsrinuksmo, B. (2004). *Ensiklopedi keris*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ismaniyah, G. K. (2013). *Mau ke mana keraton kasunanan Surakarta*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- JPPN. (2015). Khawatir sultan dibisiki setan, Kiai NU Jogja tolak sabdaraja. *Jawa Post*. Diakses 4 Februari 2016 dari <http://www.jpnn.com/read/2015/06/03/307628/Khawatir-Sultan-Dibisiki-Setan,-Kiai-NU-Jogja-Tolak-Sabdaraja->.
- Kailitz, S. (2013). Classifying political regimes revisited: Legitimation and durability. *Democratization*, 20(1), 39–60.
- Kasepuhan Cirebon. (2014). *Kasultanan Kasepuhan Sejarah dan Permasalahannya di Kota Cirebon*. Diakses dari Kasultanan Kasepuhan Cirebon.
- Kementerian Penerangan. (1957). *Republik Indonesia: Daerah Istimewa Jogjakarta*. Jakarta: Kementerian Penerangan.
- Kershaw, R. (2001a). Indonesia: The exception that proves the rule? Dalam R. Kershaw (Ed.), *Monarchy in South-East Asia: The faces of tradition in transition*. New York: Routledge.

- _____. (2001b). *Monarchy in South East Asia: The faces of tradition in transition*. New York: Routledge.
- Khan, S. B. A. L. (2009). *Rule behind the silk curtain: The sultanahs of Aceh 1641–1699*. (Ph.D. thesis). University of London.
- Klinken, G. V. (2007). Return of the Sultan: The communitarian turn in local politics. Dalam J. S. Davidson & D. Henley (Eds.), *The revival of traditional institution in Indonesian politics: The deployment of adat from colonialism to Indigenism*. New York: Routledge.
- Kraton Yogyakarta. (2002). *Kraton Jogja: The history and cultural heritage*. Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat.
- KRT Mandoyokusumo. (1980). *Serat Raja Putra Ngayogyakarta Hadiningrat*.
- Lieven, D. (1994). *The Aristocracy in Europe 1815-1914*. New York: Columbia University Press.
- Lokasi calon makam sultan retak, pertanda apa? (2016, 23 Februari). Diakses 24 Februari 2016 dari <http://krjogja.com/read/291827/lokasi-calon-makam-sultan-retak-pertanda-apa.kr>
- MacRae, G., & Putra, I. N. D. (2007). A new theatre-state in Bali? Aristocracies, the media and cultural revival in the 2005 local elections. *Asian Studies Review*, 31, 171–189.
- Monfries, J. (2015). *A prince in a republic: The life of Sultan Hamengkubuwono IX of Yogyakarta*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Mulder, N. (1998). *Mysticism in Java: Ideology in Indonesia*. Amsterdam: Pepin Press.
- _____. (2005). *Inside Indonesian society: Cultural change in Java*. Amsterdam: Pepin Press.
- Munck, G. L. (1996). Disaggregating political regime: Conceptual issues in the study of democratization. *Working Paper #228*. Kellogg Institute: The Helen Kellogg Institute for International Studies.
- Onghokham. (2002). Negara agraris dan maritim. Dalam Onghokham (Ed.), *Dari soal priyayi sampai Nyi Blorong: Refleksi historis nusantara*. Jakarta: Kompas
- Pakuningrat, G. (2015). GKR Ray Ciptomurti [Press release].
- Pohon keramat kraton Yogyakarta tumbang. (2016, 3 Februari 2016). Diakses 24 Februari 2016 dari <http://krjogja.com/read/289658/pohon-keramat-kraton-yogyakarta-tumbang.kr>. KR Yoga.
- Polemik daftar riwayat hidup calon gubernur DIY. (2015, 16 Februari). *Kedaulatan Rakyat*, Hlm.1.
- Pranatan tata rakite pepintahan karaton ngayogyakarta hadiningrat, 01/DD/HB.X/EHE-1932 C.F.R. (1999).
- Reid, A., & Ito, T. (1985). From harbour aristocracies to feudal diffusion in 17th century Indonesia: The case of Aceh. Dalam E. R. Leach, S. N. Mukherjee, & J. Ward (Eds.), *Feudalism: Comparative studies*. Sydney: Sydney Association for Studies in Society and Culture.
- Ricklefs, M. C. (1981). *A history of modern Indonesia c 1300 to the Present*. London: The Macmillan Press Ltd.
- _____. (1999, Oktober). Time and time again in Java. *History Today*, p. 49.
- Robson, S. O., & Robson-McKillop, R. (2003). *The Kraton: Selected essays on Javanese Courts*. Leiden: KITLV Press.
- Roem, M., Lubis, M., Mochtar, K., & Maimoen, S. (2011). *Takhta untuk rakyat: Celah-celah kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Selosoemardjan. (1962). *Social changes in Yogyakarta*. New York: Cornell University Press.
- Siswoyo, H., & Waskita, D. (2015, 4 Mei). Sabda raja sultan Yogya dikritisi. Diakses 30 Januari 2016 dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/621806-sabda-raja-sultan-yogya-dikritisi>.
- Smith, C. Q. (2009). The return of the Sultan? Power, patronage, and political machines in “post”-conflict north Maluku. Dalam M. Erb & P. Sulistiyanto (Eds.), *Deepening democracy in Indonesia? Direct elections for local leaders*. Singapore: ISEAS.
- Soemanto, B. (2003). *Cerita rakyat dari Yogyakarta* (Vol. 3). Yogyakarta: Grasindo.
- Suhartono. (1991). *Apanage dan bekel, perubahan sosial di pedesaan Surakarta (1830–1920)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Sulistiyanto, P. (2009). Pilkada in Bantul district: Incumbent, populism and the decline of royal power. Dalam M. Erb & P. Sulistianto (Eds.), *Deepening democracy in Indonesia? Direct election for local leaders*. Singapore: ISEAS.
- Syamsi, I. (2012). G.K.R Hemas: Ratu di hati rakyat. *Kompas*.
- Robohnya kraton kami. (1985, Februari 16). *Tempo*, hlm. XIV.
- Wamin, Mbahnya nelayan Yogyakarta. (2009, Mei 5). *Kompas*.
- Wicaksono, P. (2015, 7 Mei). Muhammadiyah dan NU sesalkan langkah sultan. *Koran Tempo*.

Wittfogel, K. A. (1967). *Oriental despotism a comparative study of total power*. New Haven: Yale University Press.

Wolters, O. W. (1999). *History, culture, and region in southeast Asian perspectives*. Southeast Asia Program Publications, Southeast Asia Program, Cornell University.

Woodward, M. R. (1989). *Islam in Java: Normative piety and mysticism in the sultanate of Yogyakarta*. Tucson: University of Arizona Press.

Zakaria, A. (2015, 12 Mei). NU pertanyakan sabda raja berdasarkan wahyu. *Koran Tempo*.